

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagian besar berasal dari pemanfaatan potensi yang ada di desa itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya yang ada dapat menciptakan peningkatan pendapatan suatu daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun non - dasar pada suatu daerah atau desa. Namun demikian, pemanfaatan potensi sumber daya yang ada hendaknya dapat berkelanjutan dan mencapai target yang telah dibuat dan disetujui bersama. Diantaranya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada terdapat peran serta masyarakat dan pemerintah di dalamnya supaya terjadi pembangunan yang berdaya guna dan berkelanjutan. Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro dalam Ramadhani, 2017).

Disamping dengan adanya pemanfaatan sumber daya yang ada, perlu adanya inovasi agar tetap berkelanjutan dalam membangun dengan program atau pemberdayaan yang dicanangkan. Seperti yang telah dilakukan di Desa Ponggok, Polanharjo, Karangnom, Klaten. Pada mulanya Desa ponggok merupakan salah satu desa di Kabupaten Klaten dengan penghasilan yang kurang dibandingkan dengan desa lainnya di Kabupaten Klaten. Hal ini tergambar dalam PAD yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Ponggok, misalnya berupa jalan yang masih banyak yang rusak, fasilitas sosial yang masih kurang, seperti fasilitas pendidikan dan lahan pekerjaan yang masih kurang, dan pendapatan masing-masing warga di Desa Ponggok.

Menjadi kesulitan bagi peneliti sendiri karena sumber data yang terdapat pada desa Pongkok sangatlah minim. Data-data yang terhimpun pada aparat desa belumlah lengkap. Hal ini terjadi mengingat bahwa desa pongkok sebelum terdapat BUMDes dengan pengelolaan wisata air yang maju hampir disebut sebagai desa tertinggal jika dibandingkan dengan desa lainnya. Namun berbeda dengan sekarang, semenjak BUMDes berdiri, perlahan semua aspek yang terdapat pada desa Pongkok sudah mulai berkembang.

Dengan adanya pemikiran yang kreatif dan inovatif dari Kepala Desa Pongkok, akhirnya dibentuklah BUMDes Tirta Mandiri untuk digunakan sebagai alat dalam mengelola potensi yang ada di Desa Pongkok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pongkok. Pemerintah Desa Pongkok mendirikan Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 15 Desember Tahun 2009 yang berdasarkan kepada putusan yang tertuang di Peraturan – peraturan Desa Nomer 6 pada Tahun 2009 Badan Usaha Milik Desa dengan nama yang lebih spesifik ialah BUMDes TM tetapi pada waktu dulu saat pendiriannya Badan Usaha Milik Desa ini belum adanya fokus untuk suatu pengembangan di bidang wisata. Bukan tanpa kendala, dalam upayanya memajukan Desa Pongkok Junaedi mengaku kesulitan terbesar yang ia hadapi datang dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten di bidangnya. "SDM dengan *mindset* dalam tanda kutip ya kita hidup di desa. Ini harus kita ubah pola *mindset*-nya dari mulai pertanian, perikanan, UKM dan lain-lain supaya pengelolaan ini bisa maksimal(Claudia, 2018).

Pada awal mula pembukaan BUMDes, masih ditemuinya banyak rintangan berupa minimnya pemasukan yang digunakan dalam memenuhi biaya operasional BUMDes. Menurut keterangan salah satu pegawai BUMDes yang bernama Sentot yang dikutip oleh Jawapos, “para pegawai BUMdes hanya digaji sebesar 300-500 ribu per bulan dan juga belum dapat memenuhi tagihan listrik bulanan, selain itu juga belum dapat membeli peralatan

yang mendukung sarana ketersediaan wahana air Umbul Ponggok yang di kelola oleh BUMDes Tirta Mandiri (Wancoko, 2018).

Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono memang memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi belum bisa menggali potensi desa. Hal itu membuat warga mulai mencari ide dan sebagainya. "Akhirnya desa ini meminta bantuan Universitas Gadjah Mada (UGM). Bantuannya berupa kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa. Ada sekitar 40 mahasiswa. Adapun KKN pertama fokus pada penelitian permasalahan desa seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Selanjutnya KKN kedua fokus pada potensi desa, kemudian KKN ketiga fokus pada pemberdayaan ekonomi. "Akhirnya kami dulu berpikir bagaimana mengolah ini seperti skripsi. Ada tantangan, banyak pengangguran, banyak rentenir (Nurohmah, 2017).

Mereka diminta menggali potensi Ponggok. Apa yang memungkinkan untuk menjadi andalan desa tersebut. Mahasiswa - mahasiswa itu memberikan masukan bahwa potensi desa tersebut adalah mata air atau umbulnya. Namun, pengelolaannya tidak maksimal. "Pengelolaan seadanya, padahal bisa menjadi tempat wisata. Dari situlah kami mulai sadar. Kami ingin jadikan umbul tempat wisata (Safutra, 2018).

Dengan penuh keyakinan serta kerja keras para anggota yang bekerja di Badan Usaha Milik Desa mempunyai motivasi yang tanpa henti – hentinya yang didorong oleh kepada desa ponggok itu sendiri dengan perlahan akhirnya membuahkan hasil juga yang akhirnya bisa melakukan suatu gerakan yang lebih baik dari pada yang sebelumnya. Dalam hitungan baru 1 Tahun saja Badan Usaha Milik Desa ini telah mendapatkan suatu laba yang lumayan besar dengan nominal Rp. 100 Juta dari pendapatan yang dihasilkan maka disetor atau diberikan untuk Pendapatan Asli Desa sebanyak Rp. 30 Juta yang dimana 30 % dari laba Pada Tahun 2010.

Dengan berlandaskan sebuah kepercayaan kepada warganya untuk berinvestasi yang mulanya hanya 600 KK otomatis hanya sekitar 20% saja yang ikut pada awalnya. Setiap KK berinvestasi Rp 5 Juta akhirnya mendapatkan uang sebanyak Rp 600 Juta Tahun 2011.

Dengan seiringnya waktu yang sudah berjalan wisata air yang sudah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri pada waktu itu memang pada awalnya tidak bisa langsung terkenal serta tidak langsung menghasilkan keuntungan. Adanya suatu proses yang dialami dalam menjalankan usaha tersebut yaitu proses naik turun dan juga pernah mengalami kerugian pada saat awal. Pada awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa tersebut banyak warganya yang masih skeptis. Dengan berjalannya waktu perlahan tren mulai terlihat dimana adanya kenaikan kunjungan naik pada Tahun 2014. Orang – orang mempromosikan dengan media sosial mereka seperti Facebook, Instagram. Setiap bulan ada yang berkunjung sekitar 30 ribu hingga 50 ribu sungguh seperti mimpi. Harga tiketnya berkisar Rp. 15.000,- mereka mempunyai pendapatan kotor kurang lebih Rp. 700 Jutaan untuk tiap bulannya khususnya untuk wisata air di Umbul Ponggok.

Pada Tahun 2016 desa Ponggok telah mengembangkan unit wisatanya yang mempunyai nama Ponggok Ciblon yang dimana wahana tersebut untuk kolam renang anak serta dewasa selain itu juga terdapat resto serta terdapat warung apung selain itu juga ada waduk galau untuk memancing pada tahun 2017 nanti menjadi pariwisata yang terpadu seperti adanya tanaman air serta terdapat wahana untuk outbond selain itu juga ada permainan adventure. Dana yang dibutuhkan untuk membangun objek wisata ponggok ciblon tidak sedikit dengan nominal yang cukup besar Rp. 30 Milyar. Mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 15 Milyar dari bank serta dari saham – saham warga dengan kisaran Rp. 10 Milyar serta dari pemerintah yang ada di desa dengan nominal Rp. 5 Milyar (Rachman, 2017).

Seiring dengan berjalannya waktu BUMDes mampu bangkit dan menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat Desa Pongkok melalui program-program kerja yang telah diprakarsainya demi menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa termasuk didalamnya peningkatan ekonomi desa. Program tersebut diantaranya renovasi rumah layak huni, satu rumah satu sarjana, bantuan premi BPJS kas warga Desa Pongkok (Wancoko, 2018).

Pemerintah sejatinya sudah mengeluarkan peraturan mengenai desa dan bumdes. Contohnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 mengenai Desa yang akhirnya diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha MilikDesa (Bumdes). Selain itu juga ada beleid Permendesa No 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan serta Pembubaran Bumdes. Saat ini UU yang tertuang di dalam Nomer 6 pada tahun 2014 mengenai desa sudah bisa menjadi landasan hukum.

Selain program yang dicanangkan oleh BUMDes, dalam pengelolaannya BUMDesa tidak lupa selalu mengikutsertakan masyarakat sebagai aktor yang penting dalam mengawasi kinerja BUMDes Tirta Mandiri dan pengalokasian dana untuk pembangunan desa dan untuk perkembangan BUMDes itu sendiri. Dari situlah akan dihasilkan alokasi dana yang dapat meningkatkan ekonomi Desa Pongkok melalui pendapatan yang diperuntukkan untuk pembangunan.

Menurut data yang dikeluarkan BUMDes Tirta Mandiri, pendapatan atas hasil usaha pemanfaatan potensi desa. Pada kisaran tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2012 mempunyai pendapatan yang tidak bersih dari BUMDes Tirta Mandiri sebanyak Rp. 150 Juta. Setelah itu satu tahun berjalan mengalami peningkatan dengan kisaran Rp. 600 Juta. Dimana pada tahun 2013 penghasilan BUMDes Tirta Mandiri mencapai 221 Juta sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi Rp 1,1 Miliar

selanjutnya Tahun 2015 Rp 6,1 Miliar, selanjutnya Tahun 2016 mendapatkan Rp 10,3 Miliar dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 15 milyar (Jefriando, 2017).

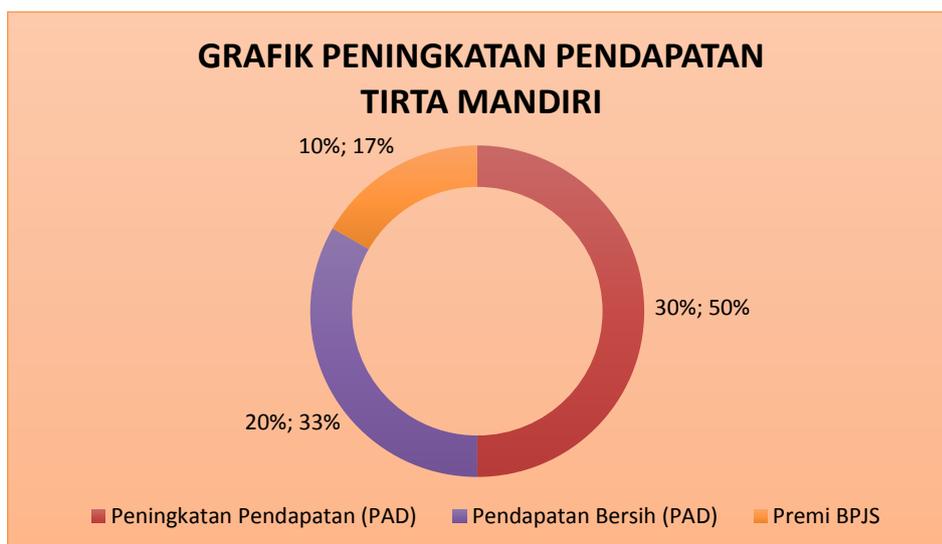
Grafik 1.1 Pendapatan Tirta Mandiri



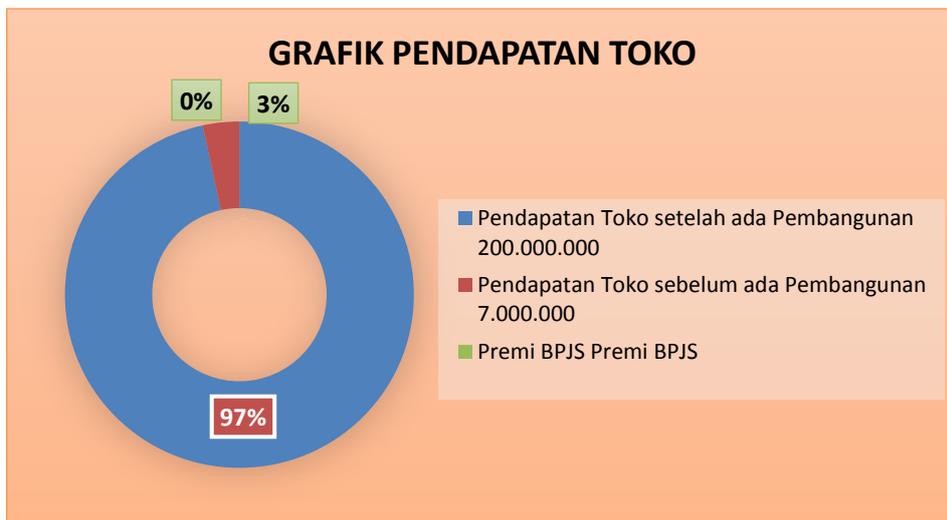
Dengan adanya peningkatan pendapatan maka Pendapatan Asli Daerah serta di desa meningkat sehingga terdapat keuntungan 30 % yang ada pada akhirnya di setor ke Pendapatan Asli Daerah yang ada di desa. Setelah itu sisanya ada 10 % untuk memback up premi BPJS para masyarakat dengan kelas 2. Selain itu ada program pemerintah 1 rumah 1 sarjana yang artinya keuntungan dari wisata umbul ponggok itu untuk beasiswa.

Pada awalnya toko desa yang hanya mempunyai omset sebesar Rp 7 Juta dalam waktu satu bulan sekarang sudah menjadi Rp 200 juta dalam sebulan dengan memakai mesin EDC yang agennya 46 nya BNI. Jadi untuk semua program yang ada di Bank BNI sudah diterapkan.

Grafik 1.2 Peningkatan Pendapatan Tirta Mandiri



Grafik 1.3 Pendapatan Toko



Semua hasil tersebut diatas, didapatkan dari manajemen kerja yang baik oleh BUMDes Tirta Mandiri. Pada saat pengelolaan, BUMDes Tirta Mandiri menerapkan budaya kerja seperti integritas, profesionalitas, kerjasama, inovasi, serta pelayanan prima. Hasilnya kemudian, BUMDes Tirta Mandiri, bukan hanya berhasil pada wisata saja, tetapi juga saat ini sudah mengelola jasa keuangan berupa pinjaman atau kredit usaha, persewaan seperti kios kuliner dan rental kendaraan serta gedung, perikanan berupa budidaya ikan, air bersih berupa penyediaan air bersih PAM Desa, dan dapat mengelola toko desa berupa mini market. Pengelolaan BUMDes dengan program sebanyak ini tentu merupakan sebuah manajemen organisasi yang sangat baik, dan tentu saja program tersebut dirancang untuk bisa mensejahterahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul Efektivitas Pengelolaan Bumdes Tirta Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Desa, di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Tahun 2018. Yang

membuat ketertarikan ialah bahwasannya dulu desa ponggok sempat masuk dalam daftar desa tertinggal kemudian bangkit dengan adanya Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan bumdes Tirta Mandiri yang ada di desa Ponggok untuk pengelolaannya yang tepat yang membuat desa ponggok tersebut mendapatkan award.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian didalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Desa (Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Tahun 2018) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Efektivitas Pengelolaan Bumdes dalam Meningkatkan Ekonomi Desa, di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat didalam penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu didalam penelitian yang akan diselenggarakan:

1. Manfaat teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia ilmu pemerintahan, yang berhubungan dengan pelembagaan birokrasi desa, pemanfaatan potensi dan pemberdayaan masyarakat desa, dan peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa.

2. Manfaat praktis

Bagi BUMDes Tirta Mandiri pada khususnya dan semua organisasi atau lembaga negara pada umumnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadikan bahan pertimbangan untuk membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan kerjasama antara masyarakat lokal dan pemerintah desa.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian yang berkaitan dengan BUMDes, maka terlebih dahulu melakukan pengkajian pada hasil penelitian-penelitian terdahulu supaya dapat menemukan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan.

1. Penelitian Ahmad Nur Ihsan (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya masih baru BUMDes Gerbang Lentera yang menjadi salah satu pengelolaan sudah baik yang ada di Kabupaten Semarang. BUMDes tersebut bisa menjadi rujukan desa yang lain agar dapat study banding. Selain itu dengan adanya proses – proses yang di jalankan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa sendiri sudah bisa dikatakan BUMDes tersebut seiring berjalannya waktu sudah menjadi lebih baik dari pada sebelumnya serta sudah sama seperti apa yang menjadi tujuan – tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Desa tersebut. Dengan membuktikan adanya unit – unit usaha yang sudah berjalan baik. Selain itu adanya faktor yang baik dengan pengelolaan Bumdes Gerbang Lentera antara lain mengenai sumber daya yang ada serta adanya partisipasi selain itu ada pemberdayaan dari

masyarakat, serta dapat dukungan dari pemerintah yang terakhir mempunyai kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi dalam mengembangkan BUMDes terdapat hambatannya itu sulitnya dalam mencari karyawan dikarenakan gaji untuk karyawan tersebut kurang menjanjikan.

Inti dari penelitian ini ialah pengelolaan yang ada di BUMDes tersebut sudah sangat baik bila mana dibandingkan dengan BUMDes yang lain yang terletak diwilayah Kabupaten Semarang. Seperti kebanyakan BUMDes yang lainnya di Kabupaten Semarang ini memiliki hambatan sulitnya mencari karyawan dikarenakan masih sulitnya memberikan gaji.

2. Penelitian Zakiyah dan Idrus (2017) dengan judul STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA PONGGOK, menghasilkan kesimpulan bahwa strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Ponggok yaitu: Pembenahan Umbul, membuat program *one village one product* dan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Semua strategi yang dijalankan kemudian membuahkan hasil yang positif yang mengantarkan Desa Ponggok menjadi desa yang mandiri dan sejahtera yang kemudian menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain baik yang ada di Jawa Tengah maupun skala nasional.
3. Penelitian Suwecantara dkk (2018) dengan judul EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes Madani di Desa Santan Tengah belum maksimal, dimana BUMDes Madani belum mampu memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang penulis gunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi belum semua tercapai. Dimana pencapaian tujuan dari Bumdes Madani belum mencapai target awal dari organisasi. Sedangkan integrasi dan adaptasi

organisasi sudah berjalan dengan baik. Kemudian temuan lainnya secara mendalam ialah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes Madani yang utama adalah penyertaan modal dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. objek penelitian ini berbeda dengan objek penelitian yang akan di teliti, yaitu BUMDEs Tirta Mandiri dengan penghasilannya yang besar dari Umbul Ponggok.

4. Penelitian selanjutnya berhubungan dengan keberadaan BUMDes sebagai lembaga / badan pengelola usaha milik desa yang berkaitan secara langsung dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar maupun ekonomi desa. Nofirattullah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul **EKSISTENSI BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SOKI KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA**, menyatakan bahwa pengelolaan administrasi pada BUMdes yang belum baik karena masih dilakukan dengan pencatatan dan tidak teratur. Kemudian selain daripada itu kurangnya komunikasi antar aktor yang berperan dalam BUMdes, terutama lembaga pemerintah dan pengelola BUMDes termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat. Yang terakhir ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pengelola BUMdes ke desa-desa yang ada di sekitar lingkungan. Namun, BUMDes tetap membantu masyarakat prasejahtera dengan memberikan pinjaman modal untuk berusaha.
5. Penelitian Hudiono (2018) bertumpu pada program yang dicanangkan BUMdes. Penelitian tersebut memiliki judul **EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Bumdesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas)**. Dengan hasil penelitian sasaran program yang ditujukan kepada masyarakat desa Samudra Kulon sebagai nasabah simpan pinjam BUMDesa Arto Doyo dapat dikatakan sudah efektif. Selain itu, sosialisasi program didapatkan hasil yang kurang efektif dan hasil yang

kurang efektif karena pendapatan yang diperoleh warga masyarakat desa Samudra Kulon yang penerima bantuan pinjaman modal dari hasil kegiatan usahanya masih rendah. Pendapatan yang diperoleh belum mencapai criteria untuk dikatakan berdaya.

6. Penelitian Zulkarnaen (2016) dengan judul PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PONDOK SALAM KABUPATEN PURWAKARTA semakin memberikan gambaran pemanfaatan potensi desa yang sangat berguna untuk meningkatkan ekonomi desa. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Keberadaan BUMDES untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya segera membentuk pengelolaan BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDES untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.
7. Penelitian Kohen Sofi (2018) judul COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 hasil Collaborative Governane mendorong transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri ini dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mengikut sertakan masyarakat Desa Ponggok dan para pemangku kepentingan. Collaborative Governance mendorong Pemerintah Desa Ponggok dan Badan Usaha Milik Desa Ponggok melalui musyawarah Desa, menghasilkan program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Desa

Ponggok, seperti kartu cerdas, kartu sehat, kartu sehat dan kartu wirausaha, dan program-program ini menjadi program unggulan oleh Pemerintah Desa Ponggok.

8. Penelitian Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari judul PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) hasil Peran pemerintah Desa Bumi aji dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai fasilitator pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator dalam membentuk kepengurusan dan organisasi BUMDes, sebagai pengelolaan melaksanakan program pembangunan Desa berkelanjutan dan memberikan pengawasan kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. Pemerintah Desa Bumi aji sudah berperan penting dalam pendirian, pengembangan dan peningkatan BUMDes karena program BUMDes mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Desa Bumi aji.
9. Penelitian Herlina Muzanah Zain (2018) Judul EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa mengacu pada beberapa pendekatan khususnya pendekatan sasaran bahwa BUMDes Amarta dinilai belum efektif memberikan kontribusi atau pemasukan terhadap Pendapatan Asli Desa Pandowoharjo. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan BUMDes. Untuk dapat meningkatkan pendapatan pada BUMDes Amarta itu sendiri tentunya perlu adanya penambahan unit usaha dan pemasaran produk yang lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi kajian penting sebagai bahan referensi untuk memperbaiki berbagai kendala maupun permasalahan yang ada.
10. Penelitian Susanto dan Muhammad Iqbal (2018) judul EFEKTIFITAS PERANAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI BUMDES Sebagai

Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat hasil Konsep mengelola sumber daya alam tingkat desa oleh BUMDesa telah secara eksplisit dilaksanakan oleh undang-undang dan peraturan yang relevan seperti UU Desa, Peraturan Pemerintah sebagai implementasi UU Desa dan juga sebagaimana ditetapkan dalam berbagai peraturan menteri teknis sebagai implementasi dari dua jenis legislasi, maupun Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan pelaksanaan hak desa atas sumberdaya alam skala desa yang benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, perlu mengatur ketentuan peraturan teknis untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan dalam pembentukan dan pelaksanaan BUMDesa untuk mengelola sumber daya alam di tingkat desa dan pengawasan serta pembinaan harus dilakukan dengan cara yang lebih terfokus baik pada tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten / kota dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam skala desa oleh BUMDesa.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Efektivitas :

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik (Pabundu 2014 : 129). Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun di luar organisasi (Priansa & Garnida 2013 : 11). Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Mahmudi 2015 : 86).

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan

keluaran dengan hasil (output – outcome). Outcome dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (Zulfah 2017 : 9).

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu (Roymond & Simamora 2008 : 31).

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.
2. Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan (Asnawi, 2013 : 6).
3. Menurut Purwaningsih (2010) mengatakan bahwa efektifitas dalam sudut pengguna adalah terpenuhinya keinginan dan harapan dari pencarian informasi yang mereka

butuhkan. Sedangkan efektifitas dari sudut pandang perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan prosedur dan mekanisme operasional yang dibenarkan sehingga tercapai suatu kepuasan yang telah ditetapkan.

4. Menurut Sedarmayanti (2009 : 59), Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.
5. Menurut Robbins dalam Tika P. (2008) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Menurut Aan Komariah dan Cepi Tratna (2005 : 34) yang dimaksud efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.
7. Keberhasilan suatu organisasi tergantung dari efektivitasnya seperti yang dikemukakan oleh Kurniawan (2005 : 106) “menekankan pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi”.
8. Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) efektivitas yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi”.
9. Sumaryadi (2005 : 105) efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan

yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

10. Menurut Mulyasa (2004 : 82) dalam bukunya manajemen berbasis sekolah menjelaskan: efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.
11. Menurut Sondang P. Siagian (2001), mendefinisikan efektivitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan. Ini artinya jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
12. Menurut Supriyono (2000 : 29), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Campbell J.P. (1989 : 121) dalam skripsi Fajarwati (2017) adanya beberapa cara dalam mengukur efektivitas secara umum serta yang paling mencolok ialah :

1. Adanya keberhasilan dari program

Dengan adanya efektivitas program tersebut dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan operasional untuk dilaksanakannya program kerja tersebut seperti pada awal tujuan tersebut sudah ditetapkan sebelumnya. Kita dapat melihat berhasilnya sebuah program tersebut dilihat dari

prosesnya serta mekanisme yang ada di kegiatan tersebut saat dilaksanakan dilapangan.

2. Terdapat keberhasilan mengenai sasaran

Kita dapat melihat efektivitas tersebut dari suatu pencapaian suatu tujuan serta dengan cara memusatkan perhatian dari aspek output yang artinya bisa diukur dengan mengetahui seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan serta prosedur dalam organisasi agar dapat mencapai apa yang sudah menjadi tujuan yang telah disepakati.

3. Adanya kepuasan terhadap Program

Kepuasan tersebut merupakan adanya kriteria efektivitas yang dapat mendorong kepada keberhasilan program tersebut agar dapat terpenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan tersebut bisa dirasakan untuk pengguna terhadap kualitas jasa serta produk yang dihasilkannya. Bila produk serta jasa yang diberikan semakin berkualitas maka para pengguna akan merasakan kepuasan semakin tinggi maka dapat di timbulkan keuntungan untuk Lembaga.

4. Adanya pencapaian tujuan yang menyeluruh

Sampai sejauh mana dalam organisasi tersebut melakukan tugasnya agar dapat mencapai tujuan. Dalam hal ini adanya penilaian secara umum dengan berbagai kriteria tunggal serta dapat menghasilkan penilaian secara umum dalam efektivitas organisasi tersebut.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu (Steers, 1985 : 9) :

1. Terdapat karakteristik dalam organisasi

Dalam organisasi terdapat karakteristik yang terdiri dari struktur serta teknologi organisasi yang bisa berpengaruh dalam hal – hal tertentu dari segi efektivitas dengan caraa papun. Maksudnya struktur tersebut mempunyai hubungan yang relative tepat sifatnya antara lain bisa kita jumpai di dalam organisasi, selain itu hubungan dengan berbagai susunan yang ada di dalam sumber daya manusia yang ada, serta struktur tersebut meliputi bagaimana cara dalam berorganisasi agar dapat menyusun orang – orang yang ada di dalamnya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada selain itu maksud teknologi ialah sebuah mekanisme yang ada di organisasi agar dapat mengubah sebuah masukan mentah menjadi keluaran atau disebut output.

2. Terdapat karakteristik yang ada di lingkungan

Di dalam aspek yang ada di lingkungan luar serta di lingkungan yang ada di dalam dapat dinyatakan bahwasannya keduanya tersebut mempunyai pengaruh terhadap suatu efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut tidak sama tetapi sedikit berbeda, walaupun sedikit berbeda tetapi keduanya saling berhubungan. Di lingkungan yang ada diluar semua terdapat kekuatan yang timbul diluar batas – batas organisasi tersebut serta dapat berpengaruh terhadap keputusan dan tindakan yang akan di lakukan di dalam organisasi itu. Faktor yang berpengaruh terhadap sebuah dinamika dalam organisasi yang pada umumnya ialah adanya derajat kestabilan yang memang relative dari lingkungan tersebut, serta selain itu juga adanya derajat kompleksitas di dalam lingkungan dan yang terakhir ialah derajat ketidakpastian di lingkungan (Steers, 1985 : 10).

Sedangkan yang ada di lingkungan yang di dalam umumnya ialah terdapat iklim di dalam organisasi tersebut antara lain berbagai macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variable kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan (Steers, 1985).

3. Adanya karakteristik pekerja

Pada realitanya semua anggota yang ada di dalam organisasi tersebut merupakan faktor yang sangat berpengaruh penting karena mereka dalam jangka waktu yang cukup lama dapat mempermudah atau memperlancar atau bisa terwujudnya tujuan organisasi. Dalam pekerja ialah sumber daya secara langsung berhubungan dengan pengelolaan semua yang ada di sumber daya yang ada di organisasi, oleh karena itu dalam berperilaku pekerja tersebut sangat mempunyai pengaruh terhadap sebuah pencapaian di dalam tujuan organisasi yang ada. Pekerja ialah sebagai modal utama dalam organisasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap efektivitas, oleh karena itu walaupun adanya teknologi yang digunakan sudah canggih serta terdapat struktur yang sudah baik tetapi bila tidak ada seorang pekerja maka bisa dikatakan bahwa semua itu tidak ada gunanya (Steers, 1985).

4. Terdapat kebijaksanaan serta praktek di dalam manajemen

Pada umumnya pemimpin selalu memainkan peran sentral di dalam suatu keberhasilan yang ada di organisasi dimananya dengan melalui perencanaan, serta koordinasi selain itu juga dapat memperlancar kegiatan – kegiatan yang mengarah pada sasaran. Para pemimpin tersebut mempunyai kewajiban bisa menjamin bahwa struktur yang ada di organisasi tersebut selalu konsisten serta dapat menguntungkan untuk teknologi selain itu di dalam area lingkungan yang ada. Hal tersebut merupakan tanggungjawab para pemimpin agar bisa menetapkan sistem imbalan yang pantas bagi pekerja sehingga para pekerja yang ada di dalam organisasi tersebut bisa memuaskan kebutuhan serta tujuan pribadinya selain itu dapat mengejar tujuan – tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan dalam organisasi. Pemimpin mempunyai peranan fungsi yang sangat penting. Semakin sulitnya proses teknologi serta semakin sulit dan kejamnya keadaan yang ada di lingkungan tersebut, peran di dalam manajemen selalu berkoordinasi dengan orang serta proses yang dilakukan agar terciptanya keberhasilan didalam organisasi tersebut semakin bertambah sulit tetapi selain itu juga semakin penting artinya (Steers, 1985).

4. Teori Pengelolaan Dan Bumdes :

Dalam pengelolaan katanya ialah “kelola”, yang ditambahi dengan kata “pe” serta mempunyai akhiran kata “an”. Selain itu terdapat istilah lain dalam kalimat pengelolaan itu ialah “manajemen”. Manajemen yang mempunyai kata asli dari bahasa inggris adalah management yang bisa diartikan sebagai ketatalaksanaan serta dalam tata pimpinan dan yang terakhir dalam pengelolaan (Syaiful Bahri Djamarah, 2006 : 174). Pengelolaan yang mempunyai asal kata dari manajemen atau

administrasi. Dalam hal tersebut sama seperti yang telah di kemukakan (Husaini Usman, 2006 : 3) Management itu sendiri mempunyai terjemahan dari bahasa Indonesia yang berarti manajemen atau pengelolaan.

Arti dari Manajemen adalah pengelolaan, penyelenggaraan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan / sasaran yang diinginkan (Pius, 1994 : 434). Maka, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan / manajemen adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien (Arikunto, 1992 : 8).

Berikut ini beberapa pengertian pengelolaan (manajemen) menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Moekijat pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan (Adisasmita, 2011).
2. Menurut Adi sasmita (2011 : 22) berpendapat bahwasannya pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”
3. Menurut George R. Terry pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan (Sugiama, 2013).
4. Menurut Arifin Abdurrachman sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto (2008 : 7), yang mengartikan manajemen merupakan kegiatan- kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan

menggunakan orang-orang pelaksana. Jadi, dalam hal ini kegiatan dalam manajemen terutama adalah mengelola orang-orangnya sebagai pelaksana.

5. Menurut James A.F. Stoner (2005 : 7), manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota-anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Menurut Suharsimi arikunta (1988 : 8), pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensidesa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif

Di dalam Badan Usaha Milik Desa semua komponen yang ada tentunya terlibat dan tentunya mereka harus bisa melakukan kerjasama dengan baik agar dapat melakukan pengembangan serta keberlangsungan hidup untuk usahanya.

2. Partisipatif.

Semua komponen di Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes yang terlibat di dalamnya otomatis mereka harus bersedia dengan sukarela atau bisa memberikan dukungan serta dapat berkontribusi dalam mendorong kemajuan usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa tersebut.

3. Emansipatif

Di dalam Badan Usaha Milik Desa semua komponen yang terlibat di dalamnya harus diperlakukan sama tidak boleh memilih – milih atau memandang dari segi golongan, suku serta dari penganut keyakinan atau bisa disebut keagamaan.

4. Transparan

Semua kegiatan yang pada dasarnya dapat mempunyai suatu pengaruh perihal suatu kepentingan – kepentingan yang ada di dalam warganya maka harus diketahui semua golongan warganya melalui cara terbuka serta dengan kemudahan.

5. Akuntabel

Semua kegiatan dalam usaha otomatis harus bisa di pertanggungjawabkan dengan cara teknis serta administratif.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa harus dapat di kembangkan serta dapat dilestarikan oleh masyarakat setempat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa tersebut.

Dalam implementasi tentang mengalokasikan dana desa maka dalam proses penguatan suatu ekonomi yang ada di desa dengan melalui adanya Badan Usaha Milik Desa yang dimana diharapkan lebih akan berdaya dari sebelumnya. Untuk hal ini penyebabnya karena adanya penopang antara lain terdapat dana untuk anggaran – anggaran yang ada di desa tersebut yang lama kelamaan makin besar. Maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan adanya ketersediaan – ketersediaan modal yang sudah cukup dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa tersebut. Bila dalam hal ini berjalan dengan sesuai maka yang terjadi adalah meningkatkan pendapatan asli di desa otomatis bisa dipergunakan untuk kegiatan – kegiatan dalam pembangunan yang ada di desa.

Dalam upaya penguatan ekonomi yang ada di desa hal yang utama yang penting ialah adanya penguatan kerjasama atau bisa di sebut dengan cooperator selain itu dengan bisa membangun kebersamaan atau dapat menjalin kebersamaan di semua golongan masyarakat desa tersebut. Pada akhirnya hal tersebut bisa menjadi daya dorong untuk mengupayakan dalam hal mengentaskan kemiskinan yang ada selain itu juga dalam hal pengangguran serta dapat membuka akses ke pasar.

Pasal 25 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan dari inovasi. Strategi tersebut yaitu sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes, pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes, pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting), analisis kelayakan usaha, pengembangan kerjasama kemitraan strategis, diversifikasi usaha (Permendes 4 Tahun 2015).

Dalam kegiatan operasional dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri ada 4 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Sistem pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan proses evaluasi terutama terkait dengan standar keuangan dan penganggaran, sampai dengan implementasi anggaran meliputi efektifitas, capaian dan nilai lebih kegiatan yang masuk dalam penganggaran. (Controlling, Monitoring dan Evaluasi).
2. Sistem akuntansi dengan dukungan administrasi yang sederhana namun sudah dapat memenuhi kebutuhan dan standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.
3. Sistem administrasi yang BUMDes yang terpisah dengan sistem administrasi desa terkait dengan keuangan dan aset – aset yang dimiliki / kekayaan masing – masing antara desa dan BUMDes.
4. Struktur manajemen yang sederhana menyesuaikan kebutuhan namun tetap memenuhi peraturan yang ada dan berjalan sesuai dengan fungsinya masing – masing dengan profesionalisme yang terus ditingkatkan.

Proses monitoring dan evaluasi BUMDes Tirta Mandiri dilakukan secara sistematis, terstruktur dan terukur. Secara sistematis menggunakan sistem yang berlaku sesuai aturan perundangan maupun AD / ART BUMDesa Tirta Mandiri dimana sistem yang ada tidak lepas dari pola manajemen yang diterapkan baik dari sisi manajemen operasional sampai dengan manajemen keuangan.

Secara terstruktur yaitu menggunakan komponen kelembagaan BUMDesa Tirta Mandiri sesuai dengan tanggungjawab dan wewenang masing – masing komponen yang bertanggungjawab pada sistem monitoring dan evaluasi terutama pada posisi komisaris, direksi dan pengawas.

Secara terukur berarti adanya parameter yang jelas mengenai proses monitoring dan evaluasi meliputi standar minimal capaian pada proses monitoring dan evaluasi dengan indikator – indikator yang disusun bersama kemudian ditetapkan menjadi sebuah nilai – nilai dengan standar minimal maupun maksimal terhadap aspek – aspek yang dilakukan proses monitoring dan evaluasi.

Secara umum dalam sistem masyarakat Desa Ponggok terdapat pola – pola monitoring dan evaluasi yang masuk dalam kearifan lokal yaitu secara rembuk warga untuk memberikan penilaian maupun pandangan sekaligus evaluasi secara kolektif, sistem seperti ini juga diterapkan untuk mengakomodasi kritikan maupun pendapat masyarakat Desa Ponggok sebagai upaya untuk mengembangkan kontrol sosial dan memupuk modal sosial yang ada.

6. Meningkatkan Ekonomi Desa

Dalam hal membangun perekonomian sering kali dipandang bahwa adanya peningkatan dalam hal pendapatan perkapita serta dalam hal lajunya suatu pembangunan ekonomi tersebut dengan ditunjukkan melalui adanya peningkatan suatu pertumbuhan produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB dengan adanya pertumbuhan tersebut di tingkat nasional serta adanya produk domestik regional bruto untuk tingkat wilayah. Pengertian suatu pembangunan tidak bisa terpisahkan dengan definisi pembangunan dalam hal ekonomi dikarenakan pada dasarnya dalam hal membangun atau pembangunan serta membangun perekonomian ialah agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perbedaan dalam hal pembangunan perekonomian ini antara lain terdapat usaha yang dilakukan masyarakat agar bisa mengembangkan lagi kegiatan – kegiatan perekonomian serta bisa mempertinggi peningkatan pendapatan di masyarakat disisi lain untuk

pembangunan adalah mencakup permasalahan materi serta financial yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut (Arsiyah 2002 dalam Eko & Riyadh 2014).

Pembangunan perekonomian menjadi bagian dari suatu pembangunan untuk tingkat nasional. Kita bisa melihat tujuan untuk pembangunan dalam tingkat nasional di dalam suatu pembukaan undang – undang dasar tahun 1945 yang terletak pada alinea keempat bahwa dapat melindungi bangsa atau Negara Indonesia serta semua pertumpah darahan yang ada di Indonesia selain itu juga dapat bisa memajukan kesejahteraan bagi semua kalangan atau secara umum, dapat mencerdaskan suatu kehidupan bangsa tersebut, mengikuti serta aktif dalam menjaga suatu ketertiban yang ada di dunia ini yang mendasari kemerdekaan serta adanya suatu perdamaian yang abadi dan yang terakhir ialah adanya keadilan sosial. Untuk tujuan pembangunan perekonomian yang ada di Negara Indonesia ini antara lain agar dapat meningkatkan suatu kemakmuran bagi warganya serta adanya kesejahteraan. Di dalam suatu buku yang berjudul rencana pembangunan dalam kurun waktu jangka menengah secara nasional atau disebut dengan RPJMN Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang terletak pada peraturan presiden republik Indonesia nomer 7 pada tahun 2005 mempunyai tiga agenda untuk pembangunan dalam tingkat nasional yaitu terletak pada tahun 2004 hingga 2009 antara lain dapat terciptanya Negara Indonesia yang damai aman serta terwujudnya Negara Indonesia yang berkeadilan serta adanya demokratis selain itu juga adanya peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Negara Indonesia (Arsiyah 2002 dalam Eko & Riyadh 2014).

7. Cara Meningkatkan Perekonomian Pedesaan

Ekonomi masyarakat desa menjadi indikator keberhasilan perkembangan ekonomi sebuah negara. Hal itu karena bagian terkecil dari sebuah negara adalah desa, yang hingga kini masyarakatnya masih jauh dari kesan maju. Dalam upaya

memajukan desa peningkatan ekonomi masyarakat desa terlebih dahulu harus dilakukan oleh pemerintah.

Peningkatan ekonomi desa pada dasarnya terlihat pada bagaimana pengelolaan segala sumber daya yang terdapat di desa tersebut, misalnya SDM, SDA, atau potensi lainnya. Hal ini tentunya tidak akan membuat peningkatan ekonomi desa menjadi sulit, apalagi saat ini desa sudah sangat terbantu dengan adanya dana desa yang setiap tahun didapatkan dalam jumlah yang besar. Upaya peningkatakan ekonomi desa bisa dilakukan dengan menerapkan beberapa cara seperti:

1. Pembangunan sarana dan prasarana Desa

Perkembangan ekonomi desa dapat memberikan peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat dan dapat menekan angka kemiskinan pada desa tersebut. Salah satu hal yang diperlukan masyarakat desa untuk peningkatan perkonomian adalah sarana dan prasarana yang memadai, hal tersebut tentu akan membuat desa berkembang dengan cepat.

Dukungan pemerintah dalam membangun peningkatan perekonomian desa salah satunya melalui pembangunan saran dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan segala bentuk atau wadah yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Semua desa di Indonesia memulai pembangunan ekonomi dengan pembangunan sarana dan prasarana. Sarana dan prasaran yang dimaksudkan adalah pembangunan pasar desa, irigasi desa, layanan kesehatan serta sarana lainnya yang bisa mendukung masyarakat dalam peningkataan ekonomi desa.

2. Memajukan Potensi Desa

Peningkatan ekonomi desa akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu desa dapat mengelola potensi desa yang ada. Secara garis besar,

potensi desa terbagi kedalam dua bagian, *pertama* adalah potensi fisik seperti tanah, iklim, air, lingkungan geografis, binatang ternak dan sumber daya manusia. *Kedua*, potensi non fisik, hal ini seperti adat istiadat masyarakat, lembaga sosial, pendidikan, organisasi desa, dan aparatur desa.

Potensi desa dimaksudkan agar masyarakat bisa mandiri dan dapat mengelola apa yang terdapat pada wilayah sendiri tanpa bergantung dengan wilayah lainnya, jika potensi desa dapat di temukan dan dikelola dengan baik, maka kemajuan desa akan lebih cepat, masyarakat akan lebih sejahtera serta desa akan lebih makmur (Ahmad, 2017).

3. Membangun Sumber Daya Manusia yang ada di Desa

Sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu tujuan, misalnya tujuannya adalah peningkatan perekonomian desa maka SDM yang bagus akan mempercepat hal tersebut tercapai, atau setidaknya akan memperkecil resiko gagal. Membangun sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan akan menjadi sedikit lebih sulit jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa ketika hendak membangun sumber daya manusianya, sebab kultur masyarakat desa yang masih berpendidikan rendah dan masih menjaga nilai-nilai budaya menjadikan pembangunan sumber daya manusia menjadi sedikit tertantang.

Pembangunan SDM pada masyarakat pedesaan biasanya dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya masyarakat diajarkan untuk membuat pertanian yang maju dan cerdas agar

hasil panen melimpah dan berkualitas, atau memberikan pelatihan tentang organisasi pemuda agar pemuda bisa menjadi pelopor pembangunan desa dengan mencari potensi-potensi desa yang ada seperti wisata dan sebagainya (Slamet & Yaqub, 2015)

4. Pengembangan Teknologi

Perkembangan teknologi mendorong perubahan menjadi semakin maju, hal ini membawa aspek harus bergelut dengan teknologi, mulai dari pendidikan, ekonomi, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Kehidupan manusia sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari teknologi.

Teknologi menjadi baik jika dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, misalnya adalah hal peningkatan perekonomian desa, teknologi bisa digunakan untuk mempermudah akses, promosi, penjualan dan masih banyak lagi. Teknologi juga dapat digunakan agar masyarakat desa tidak tertinggal dengan masyarakat Kota (Slamet&Yaqub, 2015).

5. Melakukan Proses Berkelanjutan

Proses berkelanjutan atau sustaibel diperlukan agar perkembangan ekonomi tidak berhenti, namun tetap memiliki inovasi dan perkembangan yang baik. Sustainability pada dasarnya dapat tercapai apabila pemerintah desa memiliki visi yang jelas dan arah pembangunan desa yang berkemajuan dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu lingkungan, ekonomi dan masyarakat.

G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara

orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

2. Pengelolaan BUMDes adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program-program yang dicanangkan BUMdes demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
3. Meningkatkan Ekonomi Desa adalah menggali atau mencari potensi yang terdapat pada desa, pemanfaatan sumber daya manusia, pengoptimalan organisasi perangkat desa, pembinaan masyarakat agar menjadi desa yang dulunya tertinggal menjadi maju lebih baik, mengembangkan potensi desa agar masyarakat bisa mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Pada penelitian ini desa Ponggok berhasil menemukan potensi desa berupa air, kemudian disulap menjadi wisata air yang sampai saat ini menjadi desa wisata air yang maju berkembang dengan baik, serta mensejahterahkan masyarakat

H. Definisi Operasional

Tabel 1.4 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Efektivitas	a. Keberhasilan program.	Proses dan Mekanisme BUMDes Tirta Mandiri dan Output Program Bumdes 9.
		b. Keberhasilan sasaran.	Seberapa Jauh Tingkat Output yang diukur dalam kebijakan dan Prosedur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

		c. Kepuasan terhadap program.	Keberhasilan kualitas produk BUMDes Tirta Mandiri dan Keberhasilan kualitas jasa.
		d. Pencapaian tujuan menyeluruh.	Sejauh mana BUMDes melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan.
2	Pengelolaan/Manajemen BUMDes	a. Sistem Pengawasan.	Controlling, Monitoring dan Evaluasi BUMDes.
		b. Sistem Akuntansi.	Administrasi BUMDes, Administrasi Kelembagaan, Administrasi Keuangan.
3	Meningkatkan ekonomi desa	a. Pengembangan sarana dan prasarana desa.	Fisik dan Non Fisik.
		b. Memajukan potensi desa.	Perikanan, Pariwisata, Air bersih, Sungai, Irigasi.
		c. Membangun sumber daya manusia yang ada di desa.	Pelatihan BUMDes.
		d. Pengembangan teknologi.	Pengembangan website Ponggok Pintar, Pemanfaatan website Ponggok Pintar, Pengadaan Hp.
		e. Melakukan proses berkelanjutan.	Penanaman Pohon, Literasi.

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulisan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan menitik beratkan pada bagaimana memahami dan menjelaskan situasi tertentu berdasarkan sebab akibat dan fenomena yang diteliti. Creswell dalam R Raco menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi atau memahami suatu gejala sentral. Sementara itu tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan secara ketat rekonstruksi suatu kasus, dimana kasus disini dipahami sebagai subjek penelitian bisa individu, komunitas sosial, organisasi, maupun institusi (Fawaid, 2017).

2. Jenis Data

Pada umumnya, jenis data yang digunakan pada setiap penelitian ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, juga menggunakan kedua jenis data tersebut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti sebagai sumber informasi secara langsung pada objek yang diteliti. Dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung kelokasi penelitian. Data Primer diperoleh secara langsung dari langsung didapatkan dari informan atau nara sumber. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, tentang aspek yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti langsung datang ketempat lokasi yang mereka jadikan focus penelitian, untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan cara turun langsung ke lokasi tempat penelitian (Kharimah, 2019: 50). Dalam hal ini adalah masyarakat desa Ponggok, Pemerintah Desa, serta BUMDES desa Ponggok

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, berita-berita, jurnal, website-website serta artikel hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti pergunakan (Kharimah, 2019: 50).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa beberapa teknik, diantaranya adalah

1. Observasi

Menurut Nasution (2003 : 56) observasi ialah bagian dasar dari suatu ilmu pengetahuan. Bagi seorang ilmuwan mereka dapat bekerja dengan landasan dasar dengan adanya data antara lain yaitu realita atau fakta mengenai dunia kenyataan dengan cara melalui observasi yang dilakukan.

Menurut Alwasilah C. (2002 :211) menyatakan bahwa, observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validasi dan reliabilitasnya.

Menurut Syaodih N (2006 : 220) mengatakan bahwa, observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Semua pendapat yang ada tersebut mempunyai suatu kesamaan pemahaman mengenai observasi yaitu suatu pengamatan yang terjadi terhadap suatu objek yang ingin di teliti dengan cara langsung maupun tidak langsung agar memperoleh data yang memang harus di kumpulkan dalam suatu penelitian.

Observasi dengan melakukan secara langsung ialah dengan terjun langsung kelapangan dengan melibatkan seluruh panca indra yang kita miliki. Sedangkan observasi dengan secara tidak langsung adalah melakukan pengamatan yang bisa terbantu dengan media visual atau audio visual antara lain dengan teleskop, handycam dan lain – lain. Dalam penelitian kualitatif mempunyai fungsi sebagai alat bantu dikarenakan yang sebenarnya observasi ialah dengan cara melakukan pengamatan langsung pada “natural setting” bukan dengan cara mensetting yang sudah dilakukan rekayasa. Kesimpulan dari penelitian observasi ialah melakukan pengamatan dengan secara langsung terhadap suatu objek, situasi yang ada serta konteks dan yang terakhir makna untuk mengumpulkan suatu data penelitian (Satori & Komariah, 2012 : 105).

Disini saya mau melihat observasi dilakukan guna mendapatkan data terkait dengan :

- a. Monografi
 - b. BDT
 - c. Jumlah Karyawan yang ada di BUMDes
2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah laman website, dan surat kabar online, foto, catatan harian, catatan rapat, video. Data yang didapat dari penelusuran dan analisis dokumen ini merupakan data sekunder sebagai pendukung dari data primer yang didapat dari teknik wawancara dan observasi.

3. Wawancara

Menurut Berg (2007 : 89) membatasi wawancara sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi.

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Definisi lain dari wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2010 : 118).

Menurut Esterberg (2002), wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Kesimpulan dari wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014 : 244).

Teknik analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh hasil penelitian yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. proses analisis data kualitatif berlangsung selama sampai selesai pengumpulan data, proses analisis kualitatif terdiri dari tiga langkah yaitu:

- a. Reduksi data: yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.
- b. Penyajian data dalam bentuk teks naratif. Pada bagian ini informasi dikumpulkan untuk disusun agar memungkinkan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Analisis lain yang digunakan adalah analisis teori triangulasi. Analisis data ini dipahami sebagai strategi yang menuntun pada pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti sebagai langkah menuju pengetahuan yang lebih besar, bukan semata-mata menuju validasi dan objektivitas (Denzin dan Lincoln dalam Flick, 2017).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang kami pilih dalam penelitian ini adalah Desa Polanharjo, Kabupaten Klaten. Unit Analisis Data atau Subjek Penelitian Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Karyawan bagian Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri dan bagian Kastri Kestra dan pelayanan selain itu juga mewawancarai Perangkat Desa yaitu Kadus 1 dan Kadus 2.

6. Sistematika Penulisan

Terdapat rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini. Pada penulisan skripsi ini terdapat empat bab sebagai berikut :

Dalam Bab I terdapat pendahuluan (Latar Belakang Masalah), Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka Dasar Teori tiga teori yang pertama teori efektivitas yang didalamnya terdapat pengertian para ahli serta ukuran efektivitas dan faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang

kedua Pengelolaan Bumdes terdiri dari pengertian para ahli serta adanya prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dan yang terakhir ada meningkatkan ekonomi desa disana kita dapat melihat pengertian serta terdapat cara untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Desa. Selanjutnya terdapat Definisi Konseptual dan Definisi Operasional dan yang terakhir terdapat Metode Penelitian.

Selanjutnya untuk Bab II Terdapat deskripsi mengenai Bumdes Tirta Mandiri. Arti Logo BUMDes Tirta Mandiri, Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa TM, Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa TM, Manajemen bumdes tirta mandiri meliputi Aspek Kelembagaan, Aspek Manajemen Usaha, Peraturan Desa, Sumber Permodalan, Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Sedangkan Pengelolaan dan pengembangan unit usaha meliputi Pengelolaan Usaha, Rencana Pengembangan Usaha, Strategi Pemasaran, Strategi Peningkatan Karyawan, Strategi Operasional, Strategi Pengelolaan Keuangan.

Sedangkan Bab III terdapat pembahasan yang berisi tentang hasil wawancara untuk menjawab rumusan – rumusan masalah mengenai Efektivitas Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Pongkok dan Faktor pendorong keberhasilan BUMDes serta apa yang mengakibatkan ketidakberhasilan.

Bab IV merupakan bab yang terakhir dalam bab ini terdapat kesimpulan serta saran untuk penelitian.